

DIPLOMASI INSURJENSI DALAM PEPERANGAN ASIMETRIK

Sigit Sasongko¹

Abstrak: Dalam melakukan perlawanan terhadap pemerintahan yang sah, organisasi insurjensi mengaplikasikan banyak metode dan pendekatan. Bila awalnya organisasi insurjensi lebih cenderung bergerak dengan jalan kekerasan, dewasa ini organisasi insurjensi tersebut melakukan transformasi dengan melakukan perlawanan melalui perjuangan-perjuangan *softpower*-nya. Salah satunya adalah dengan menggunakan upaya diplomasi baik di dalam maupun di luar negeri, kemudian membentuk anggapan bahwa perjuangan untuk memperoleh hati dan pikiran rakyat telah berkembang menjadi upaya berupa perjuangan untuk merebut hati dan pikiran komunitas internasional guna mendukung perjuangan organisasi insurjensi tersebut dalam rangka meraih political ends-nya. Dalam esai singkat ini, penulis berusaha mengulas bagaimana hubungan pergerakan insurjensi di dalam dan di luar negeri dengan tujuan untuk mengetahui apakah keberhasilan diplomasi organisasi insurjensi di luar negeri dalam mengambil simpati internasional berkorelasi dengan kemampuan dan manuver organisasi tersebut di dalam negeri.

Kata Kunci: diplomasi, insurjensi, peperangan asimetrik, softpower.

1. PENDAHULUAN

Insurjensi merupakan pergerakan politik sebagai hasil dari ketidakpuasan dan penolakan dari kebijakan-kebijakan yang ditetapkan oleh suatu pemerintah atau negara. Gerakan insurjensi juga memiliki akar permasalahan yang kompleks dan berbeda-beda serta dilakukan dalam berbagai bentuk.² Dalam sejarahnya, gerakan insurjensi pada awalnya banyak dipandang sebagai gerakan-gerakan perlawanan yang menggunakan kekuatan bersenjata dimana kekerasan merupakan jalan utama yang ditempuh untuk melawan sebuah pemerintahan yang sah. Namun, seiring berkembangnya jaman, mulai tahun 1930 hingga 1940-an, perlawanan dengan penggunaan kekuatan bersenjata ini telah berkembang menjadi sebuah gerakan pemberontakan atau insurjensi yang memiliki maksud-maksud politik untuk menggulingkan rezim yang berkuasa dan program-program ideologi yang jelas telah berkembang untuk merumuskan tujuan-tujuan sebagai sebuah bentuk perlawanan. Lambat laun, organisasi insurjensi di berbagai tempat di dunia ini mengubah konsep perlawanannya dari perlawanan kekuatan bersenjata (*hard power approach*) menjadi kekuatan yang lebih lunak melalui upaya-upaya diplomasi (*soft power approach*) seperti halnya yang dilakukan oleh organisasi Taliban, Gerakan Aceh Merdeka (GAM), termasuk juga Organisasi Papua Merdeka (OPM).

Penulisan ini memiliki tujuan untuk mengetahui apakah keberhasilan diplomasi organisasi insurjensi di luar negeri dalam

mengambil simpati internasional berkorelasi dengan kemampuan dan manuver organisasi tersebut di dalam negeri. Untuk mencapai tujuan penulisan, maka tulisan ini di bagi menjadi beberapa bagian; dibagian pertama akan membahas bagaimana pendekatan *soft power* organisasi insurjensi, di bagian kedua penulis akan membahas tentang diplomasi organisasi insurjensi sebagai strategi pendekatan *soft power*, dan yang ketiga dalam penulisan ini akan dibahas tentang korelasi pergerakan insurjensi di dalam dan di luar negeri.

2. PEMBAHASAN

2.1 Pendekatan *Soft power* Organisasi Insurjensi

McCormick mengatakan bahwa salah satu komponen yang penting dalam pergerakan insurjen maupun *counterinsurgency* adalah komunitas internasional.³ Keberadaan komunitas internasional ini ikut memberikan andil terhadap keeksian suatu gerakan perlawanan dalam memperjuangkan kepentingan politiknya sehingga oleh beberapa organisasi insurjensi di beberapa dunia dijadikan sebagai salah satu potensi penting untuk didekati dalam upayanya untuk meraih dukungan yang lebih luas. Pergerakan insurjen dewasa ini terus melihat peluang dalam meraih dukungan dari luar, karena melalui dukungan dari luar tersebut bisa didapatkan seperti halnya dukungan moral, politik, teknik, finansial, dan kekuatan militer⁴ sejalan dengan pendapat dari O'Neill yang mengatakan bahwa dukungan dari luar tersebut

¹ Sigit Sasongko adalah mahasiswa Prodi Peperangan Asimetris Universitas Pertahanan yang juga anggota Divisi Kajian Lembaga Kajian Pertahanan untuk Kedaulatan NKRI "KERIS". Penulis dapat dihubungi melalui email di alamat: sigit_paskhas@yahoo.co.id

² Fadillah, Agus. 2006. *Pemberontakan dan Kontra Insurjensi*. Jakarta: FRR Law Office. Hal 13.

³ McCormick. 2011. *The Complete Win*. dalam Freeman, Michael and Hy Rothstein (ed). *Gangs and Guerrillas*. Guardian News & Media. USA.

⁴ David Galula. 2006. *Counterinsurgency Warfare Theory and Practice*. Westport: Praeger Security International. Hal. 25-26.

dapat berupa dukungan moral, politik, material dan juga dukungan tempat perlindungan (*sanctuary*).⁵

Melihat pentingnya dukungan luar (*external support*) dari komunitas internasional, maka dalam era kontemporer gerakan perlawanan organisasi insurjensi banyak yang mencoba bergerak dengan menggunakan strategi soft approach melalui upaya-upaya seperti halnya diplomasi dengan mendirikan perwakilan di luar negeri. Joseph Nye Jr, mendefinisikan *soft approach* atau *soft power* ini sebagai suatu kekuatan immateriil yang lebih menekankan pada citra non-kekerasan, dibandingkan dengan *hard power* yang lebih menekankan tindakan kekuatan bersenjata atau militer.⁶ Pada awalnya antara kedua istilah *hard power* maupun *soft power* kerap digunakan oleh negara dalam strateginya untuk menyelesaikan suatu konflik baik dengan negara lain maupun dari gerakan dalam negeri. Namun, cara-cara ini juga diaplikasikan oleh organisasi-organisasi insurjensi di beberapa negara sebagai bentuk strategi untuk meraih tujuan politiknya, ada juga yang mengkolaborasi kedua pendekatan tersebut menjadi bagian dari strateginya.

Pendekatan *soft power* ini lebih mengutamakan pendekatan dengan kekuatan non-fisik yang berhubungan dengan pembentukan citra dari suatu organisasi, artinya bahwa dengan *soft power* tersebut organisasi insurjen membangun dan membentuk pengaruh terhadap pihak lain dalam hal ini komunitas internasional atau pihak lain dengan cara membangun citra positif dan nilai-nilai (*values*) seperti hak asasi manusia, politik maupun hak-hak lainnya. Meminjam istilah dari Nye (2006) kembali disampaikan bahwa sumber-sumber kekuatan untuk membangun citra positif dapat dilakukan melalui promosi nilai-nilai yang terkandung dalam kebudayaan, cita-cita politik atau demokrasi, dan ide besar yang terkandung dalam kebijakan politik.⁷

Gerakan insurjensi juga tertarik dalam dunia internasional bukan hanya karena kebutuhan mereka untuk material berupa pasokan senjata dari luar negeri. Sebagai pihak yang lemah dalam konflik, para insurjen harus berusaha untuk meningkatkan keseimbangan relatif sumber daya, hal tersebut memungkinkan tersedia dalam lingkungan internasional. Gerakan insurjen juga tertarik dalam pengakuan diplomatik serta bantuan luar negeri yang berupa pengakuan

pemerintah asing atau pengakuan oleh organisasi internasional. Keberadaan organisasi internasional dan organisasi regional mungkin akan memiliki pengaruh besar atas keberhasilan gerakan insurjen, mereka menyediakan sebuah forum di mana para insurjen mungkin memiliki kesempatan untuk berdebat kasusnya di hadapan komunitas internasional, dan kelompok regional. *Event-event* ini dapat memberikan kerangka kelembagaan untuk menyalurkan aspirasi organisasi insurjensi untuk mendapatkan bantuan dari komunitas internasional.⁸

2.2 Diplomasi Organisasi Insurjensi sebagai Strategi Pendekatan *Soft power*

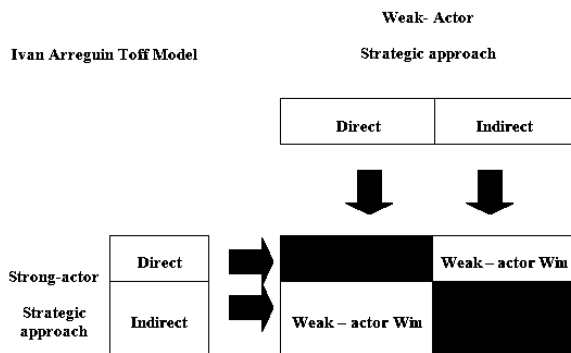
Disadari bahwa pola pendekatan *hard power* melalui perlawanan dengan menggunakan kekuatan bersenjata tidak mendapatkan hasil yang signifikan, beberapa organisasi insurjensi mulai mengubah pendekatannya dengan *soft power*. Pendekatan tersebut dapat diaplikasikan melalui kemampuan organisasi insurjensi tersebut dalam kegiatan berpolitik untuk mendapatkan citra di mata internasional. Peluang besar untuk menambah dukungan terhadap pergerakannya dijadikan sebagai langkah politik melalui kegiatan-kegiatan berdiplomasi dengan komunitas masyarakat internasional. Strategi-strategi dengan mengaplikasikan diplomasi sebagai bagian dari pendekatan *soft power* menguatkan model yang ditawarkan oleh Ivan Arreguin-Toft (2005) dimana di dalam hipotesis mengenai interaksi strategis dalam konflik asimetris. Dan di hipotesisnya (bisa dilihat dalam **Gambar1**) disebutkan bahwa ketika pihak lemah menggunakan pendekatan langsung berupa *hard power* maka kecenderungan akan mengalami kekalahan manakala pihak kuat menggunakan pendekatan yang sama. Namun, pihak lemah tetap memiliki peluang untuk memenangkan konflik tersebut ketika pendekatan yang dilakukan dirubah menjadi pendekatan *soft power* sebagai pendekatan tidak langsung. Melihat peluang untuk meraih kemenangan oleh pihak lemah, organisasi insurjensi yang sering dikategorikan sebagai pihak lemah, merubah pendekatannya dalam melawan negara sebagai pihak yang kuat. Konsep pendekatan tersebut dalam konflik maupun perang asimetrik memberikan peluang bagi pihak insurjen untuk meraih tujuan politiknya.

⁵ Bard E. O'Neill. 2005. *From Revolution to Apocalypse Insurgency and Terrorism*. Washington: Potomac Books Inc. Hal. 142.

⁶ Joseph S. Nye, Jr. 2004. *Soft power the Means to Success in World Politics*. New York: Public Affairs. Hal 5-6.

⁷ *Ibid*. Hal 10-13.

⁸ Andrew M. Scott. 1970. *Insurgency*. The University of North Carolina Press. Hal. 77-78. Chapel Hill.



Gambar 1. Ekspektasi dari interaksi strategis dalam konsep perang asimetrik
Sumber: Ivan Arreguin-Toft. 2005.
How the Weak Win Wars. NY: Cambridge

Merujuk dari konsep tersebut diatas, diplomasi menjadi salah satu langkah yang digunakan oleh organisasi insurjensi untuk terus memberikan perlawanan ketika pendekatan langsung berupa kekuatan bersenjata tidak memberikan hasil yang optimal. Era demokrasi yang digaungkan oleh banyak negara-negara di dunia ini juga ikut mendukung, dimana kondisi tersebut memungkinkan bagi suatu kelompok untuk memberikan aspirasinya kepada pemerintahan atau negara yang sah, maupun kepada dunia internasional melalui organisasi-organisasi internasional serta LSM-LSM. Pencitraan positif, simpati dan pencitraan terhadap dunia internasional merupakan sasaran yang hendak dicapai sehingga memungkinkan komunitas internasional untuk turut serta dalam memberikan dukungan terhadap organisasi insurjensi tersebut.

Kekuatan berdiplomasi menjadi modal utama untuk meraih dukungan dari dunia luar, terutama bila negara yang dilawan tidak terlalu memberikan atensi yang besar dengan pendekatan tersebut. Hal yang diperoleh dari pendekatan tersebut memungkinkan mendapat dukungan baik moral, politik, materi bahkan pengakuan kedaulatan dari negara lain manakala kekuatan berdiplomasi yang dimiliki oleh organisasi insurjensi berskala besar. Hal ini seperti halnya dilakukan oleh OPM dengan melakukan aktivitas politiknya di luar negeri seperti di Australia, Vanuatu, Inggris dan Amerika Serikat berupa kegiatan-kegiatan ceramah, orasi yang merupakan bagian dari kegiatan berdiplomasi politik untuk mendapatkan perhatian dan dukungan di negara-negara tersebut. Bahkan lebih lanjut langkah mereka mendapat sambutan ketika diberikan ijin untuk

mendirikan perwakilan OPM di Oxford, Inggris. Sejalan dengan OPM, contoh lain juga diterapkan oleh kelompok Taliban yang membuka perwakilannya di Qatar yang merupakan bagian dari upaya diplomasinya untuk memperoleh simpati dan dukungan dari masyarakat internasional. Fenomena-fenomena inilah yang kemudian membentuk anggapan bahwa perjuangan untuk memperoleh hati dan pikiran rakyat telah berkembang menjadi upaya berupa perjuangan untuk merebut hati dan pikiran komunitas internasional guna mendukung perjuangan organisasi insurjensi tersebut dalam rangka meraih *political ends*-nya.

2.3 Korelasi Pergerakan Insurjensi di Dalam dan di Luar Negeri

Banyak pemimpin organisasi insurjensi mengetahui resikonya ketika melawan kekuatan pemerintah dengan menggunakan perlawanan konvensional secara langsung.⁹ Dalam era kontemporer ini, organisasi insurjensi mulai meninggalkan pendekatan *hard power*, karena pendekatan tersebut lebih mengedepankan ancaman, paksaan, kekerasan dan hasilnya akan memberikan dampak negatif berupa resistensi atau sikap antipati terhadap kelompok insurjensi oleh komunitas masyarakat yang merupakan elemen penting karena mampu memberikan dukungan terhadap keberadaan organisasi.¹⁰ Ketika pendekatan *soft power* diterapkan, diharapkan mampu mewujudkan pendekatan dialog dan perundingan yang kemudian mampu menghasilkan akomodasi kepentingan yang mereka inginkan. Guna mengimbangi keunggulan dari sumber daya yang dimiliki pemerintah, banyak pemimpin insurjensi menekan peran strategis yang penting untuk mendapat dukungan dari rakyat melalui pendekatan *soft power* berupa salah satunya adalah diplomasi.

Keberhasilan diplomasi organisasi insurjensi di luar negeri dalam rangka memperoleh dukungan dari komunitas internasional dengan cara menarik perhatian melalui pencitraan yang positif sering dihubungkan dengan kemampuan organisasi insurjensi tersebut di dalam negeri. Namun, hubungan tersebut haruslah dilihat dari beberapa poin seperti halnya kekuatan organisasi insurjensi termasuk di dalamnya adalah kekuatan pemimpin, dukungan publik baik lokal maupun internasional, perlawanan bersenjata dan jaringan organisasi insurjensi

⁹ Brad O' Neill. Op. Cit. Hal 93.

¹⁰ Darmansjah Djumala. 2013. *Soft power untuk Aceh Resolusi Konflik dan Politik Desentralisasi*. Jakarta: Gramedia. Hal 190.

tersebut. Salah satu hal yang penting adalah ketika organisasi insurjensi mampu memelihara hubungan baik dengan Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) maupun dengan aktivis-aktivis politik, terutama yang kontra dengan kebijakan pemerintah. Hubungan baik ini akan menjadi kekuatan yang besar dalam melakukan perlawanannya terhadap negara, terutama dalam mengedepankan isu-isu pelanggaran HAM yang dilakukan oleh aparat negara yang digunakan sebagai modal untuk membentuk opini di mata dunia internasional. Manuver-manuver politik yang berkualitas tinggi akan memberikan dampak yang positif bagi keberadaan sebuah organisasi insurjensi, karena manuver politik tersebut akan mampu membawa kedua belah pihak yang bertikai untuk melakukan sebuah upaya berdiplomasi sehingga membuat peluang besar bagi para insurjen untuk dapat memperoleh pemenuhan kepentingan yang diharapkan.

Memang korelasi antara keberhasilan diplomasi organisasi insurjensi di luar negeri belumlah mutlak dikarenakan kemampuan dan manuver organisasi tersebut di dalam negeri. Bagi organisasi insurjensi yang besar sangat memungkinkan untuk memainkan strateginya dengan mengkolaborasikan pendekatan *hard power* dan *soft power*. Kekuatan besar tersebut akan memberikan bargaining position terhadap kebijakan-kebijakan yang dikeluarkan oleh negara dalam mempertimbangkan pemenuhan aspirasi-aspirasi organisasi insurjensi. Manuver-manuver politik yang dilakukan oleh organisasi insurjensi akan memberi hasil yang positif ketika adanya kemauan dari pihak negara untuk melaksanakan dialog atau perundingan yang kemudian menghasilkan akomodasi kepentingan dari kedua pihak yang bertikai.

Keberhasilan diplomasi organisasi di luar negeri akan memperlihatkan hasilnya manakala diadakannya diplomasi dari kedua pihak antara insurjensi dengan negara untuk melakukan dialog atau diplomasi. Menjadi sebuah keuntungan besar bagi organisasi insurjensi ketika pendekatan terhadap komunitas internasional dengan strategi pencitraannya berjalan dengan baik sehingga muncul adanya keinginan baik dari negara maupun tuntutan dari komunitas internasional untuk melakukan dialog. Momen berdialog ini merupakan peluang besar bagi insurjensi apabila memiliki kekuatan yang besar dalam berdiplomasi ditambah dengan dukungan yang diberikan oleh masyarakat internasional.

Melihat kasus GAM, organisasi tersebut mampu memainkan kemampuan kedua pendekatan baik kekuatan bersenjata maupun kemampuan berdiplomasi. Melalui diaspora yang berada di luar negeri mereka mampu meyakinkan masyarakat internasional dan LSM luar negeri dengan membawa isu-isu seperti halnya pelanggaran berat HAM, sikap represif aparat dan lain-lain yang membuat persepsi publik di luar negeri memberikan stigma negatif terhadap tindakan negara. hasilnya mereka mampu menuju ke arah dialog atau perundingan yang memungkinkan untuk menciptakan peluang pemenuhan kepentingan. Hal tersebut terjadi karena faktor kepemimpinan dan organisasi GAM memiliki struktur serta jaringan yang jelas sehingga jalan politik yang ditempuh dapat mereka lakukan dengan baik untuk memperjuangkan kepentingan politiknya. Hubungan antara manuver organisasi di dalam negeri dengan yang ada di luar negeri terjadi kesinergisan dan adanya kesamaan dalam visi perjuangan politiknya.

Pengalaman buruk menimpa Indonesia, ketika kita tidak siap menghadapi tekanan internasional dalam kasus Timor Timur. Pergerakan politik kelompok insurjensi saat itu berhasil membentuk suatu opini komunitas internasional bahwa pemerintah Indonesia melakukan banyak pelanggaran HAM dan memperlakukan tindakan represif terhadap penduduk lokal. Hal ini terjadi ketika 100 hingga 250 ribu warga Timor Timur kehilangan nyawa akibat sikap represif yang dilakukan pemerintah Indonesia melalui aparat militernya, yang kemudian berhasil dieksploitasi oleh pejuang Timor kepada komunitas internasional.¹¹ Kemampuan dan manuver organisasi di dalam negeri seperti halnya Fretilin juga sangat baik, didukung oleh aktivis-aktivis politik yang terus mengumandangkan perlawanan melalui demonstrasi anti pemerintah Indonesia di Timor Timur. Diplomasi insurjensi yang dilakukan oleh Ramos Horta di Eropa dan Amerika mendapat banyak perhatian publik menyangkut tindakan represif yang menyangkut kekejaman TNI di Timor Timur. Konsep peperangan asimetrik dapat diterapkan dengan baik oleh pihak pejuang Fretilin, dimana mereka mampu menerapkan strategi yang inovatif dengan menggabungkan peranan diplomasi dan taktik non konvensional melalui perlawanan bersenjata serta penggunaan media informasi yang efektif dalam meraih dukungan internasional.¹² Dari kasus lepasnya Timor Timur dari Indonesia,

¹¹ J.S Prabowo. 2012. *TNI dalam Menyikapi Perubahan Lingkungan Strategis*. Jakarta: PPSN. Hal. 108-109.

¹² *Ibid.* Hal 111.

menandakan bahwa adanya keterpaduan yang kuat antara perjuangan dan manuver di dalam negeri dengan aktivitas politik melalui jalan diplomasi di luar negeri.

Sedikit berbeda dengan OPM, organisasi insurjensi ini juga memainkan peranan melalui pendekatan perlawanan kekuatan bersenjata dan upayanya berdiplomasi di luar negeri. Namun, hal tersebut belum menunjukkan hasil yang signifikan dikarenakan belum adanya kesinergian dan keterpaduan antara organisasi di dalam dan di luar negeri. Ada beberapa poin yang menyebabkan hal ini terjadi salah satunya adalah faktor pemimpin dan visi yang dibangun dalam organisasi tersebut. Gerakan Papua Merdeka tersebut terdapat beberapa kelompok yang masing-masing kelompok tersebut mengklaim pemimpin mereka, sehingga belum adanya kejelasan siapa pemimpin utama yang benar-benar mewakili kelompok-kelompok insurjensi tersebut. Manuver politik yang dilakukan Benny Wenda dengan mendirikan kantor perwakilan OPM di Inggris untuk memperjuangkan aspirasi politiknya dan menyebarkan isu-isu suasana kebatinan orang-orang di Tanah Papua yang masih hidup dibawah penindasan dan penderitaan yang berkepanjangan seperti Afrika Selatan di masa penerapan politik Apartheid, akan tetapi kehadiran kantor tersebut oleh beberapa kelompok di dalam negeri belum dianggap sebagai bagian dari mereka sehingga hal ini belum menampakkan keterpaduan antara manuver politik yang ada di dalam dan di luar.

Perjuangan diplomatik OPM di luar negeri masih menyisakan tanda tanya, karena banyak dari kalangan masyarakat Papua sendiri menanyakan tentang perjuangan mereka mewakili siapa dan manfaatnya buat siapa.¹³ Hal tersebut didukung dengan adanya beberapa kelompok yang sudah bergerak di luar negeri juga seperti halnya Parlemen Nasional Papua Barat (PNPB) yang keberadaannya didaftarkan ke Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB), padahal sudah ada sebelumnya kelompok gerakan Papua Merdeka yang sudah mendaftar. Kedua kelompok tersebut adalah produk kelompok Forkorus Yasoboisemat-Edison Waromi, dan kemudian produk dari kelompok dari Buchtar dan Mako Tabuni, yang kemudian diketahui bahwa kedua kelompok ini tidak akur sedari awalnya.¹⁴ Keduanya juga mengklaim tidak merasa terwakili oleh sesamanya. Dari kasus Papua terlihat bahwa ketidakharmonisan kelompok perjuangan

kemerdekaan di dalam negeri mempengaruhi keberadaan perjuangan kelompok yang berjuang secara politik di luar negeri. Keaktifan dan keberhasilan kelompok di luar negeri dalam usahanya meraih dukungan komunitas internasional tidak bakal menjamin sejalan dengan misi dan visi yang diusung oleh kelompok lokal, inilah yang menjadi kelemahan dari perjuangan kelompok pergerakan kemerdekaan Papua.

Demikian juga halnya dengan kasus berdirinya perwakilan Taliban di Doha, Qatar yang bertujuan untuk membantu memfasilitasi pembicaraan antara kelompok militan itu dan pemerintah Afghanistan¹⁵, sebagai upaya perjuangan diplomatiknya di luar negeri. Manuver tersebut masih terus diperjuangkan hingga kini, struktur organisasi yang jelas dan memiliki pemimpin yang merupakan representatif dari kelompoknya merupakan modal mereka dalam meraih kepentingan tujuan politiknya. Hal ini tentu saja menambah peluang mereka dalam memperoleh dukungan politik dari dunia internasional. Dukungan komunitas internasional dan kuatnya manuver di dalam negeri merupakan dua elemen penting dalam pergerakan kelompok insurjen. Ketimpangan diantara kedua elemen tersebut akan justru memperlemah perjuangan mereka dalam meraih tujuan politiknya. Seperti halnya dalam kasus Macan Tamil atau *Liberation Tigers of Tamil Eelam* (LTTE) yang memiliki kekuatan bersenjata cukup besar di Sri Lanka akan tetapi minim dukungan dari komunitas internasional sehingga melemahkan mereka dari sisi legalitas dan dukungan dari publik baik lokal maupun internasional. Prabhakaran¹⁶ mengatakan perjuangan bersenjata adalah satu-satunya cara bertahan dari peperangan asimetris, hal ini dilakukan dari pengalamannya melakukan perjuangan tanpa menggunakan kekerasan yang menurutnya sama sekali tidak efektif dan sudah tidak relevan dengan kondisi yang ada.¹⁷ Perjuangan diaspora Tamil di luar negeri bukan dalam rangka perjuangan untuk meraih dukungan komunitas internasional, tetapi hanya mendukung secara finansial untuk menambah kekuatan bersenjata mereka dalam melakukan perlawanan. Dari kasus Macan Tamil ini juga dapat dilihat bahwa kuatnya kemampuan dan manuver organisasi insurjen di dalam negeri belum tentu berhasil dalam meraih dukungan dari komunitas internasional.

¹³ John Al Norotouw. 2012. *Save Our Papua*. Jakarta: Cergas Media. Hal. 49-50.

¹⁴ Ibid.

¹⁵ Al-Jazeera: kantor Taliban di Doha dibuka Selasa, <http://www.antaraneews.com/berita/380621/al-jazeera-kantor-taliban-di-doha-dibuka-selasa> diakses pada 21 Juli 2013.

¹⁶ Velupillai Prabhakaran merupakan pimpinan Macan Tamil yang tewas pada 17 Mei 2009.

¹⁷ Yoki Rakaryan Sukarjaputra. 2010. *Auman Terakhir Macan Tamil*. Jakarta: Kompas Media Nusantara. Hal. 63.

3. PENUTUP

Melihat dari beberapa kasus di atas, merupakan aplikasi dari konsep peperangan asimetris dengan menerapkan kekuatan pendekatan soft power yang terwakili dengan perjuangan politik di antaranya dilakukan dengan upaya kegiatan diplomatik untuk meraih dukungan komunitas internasional di luar negeri dan perlawanan melalui pendekatan hard power yang terwakili melalui penggunaan kekuatan bersenjata serta aktivitas politik lokal. Kemudian dapat dilihat bahwa korelasi keberhasilan diplomasi organisasi insurjensi di luar negeri dalam mengambil simpati internasional dengan kemampuan dan manuver organisasi tersebut di dalam negeri dapat terjadi, ketika terbentuk keterpaduan dan kesinergian dengan baik di kedua tempat tersebut. Hubungan positif akan terbangun antara gerakan insurjensi di luar dan dalam negeri ketika organisasi tersebut mengakui adanya kepemimpinan oleh seorang pemimpin yang sama, sehingga dalam penyampaian misi dan visi organisasi insurjensi tersebut dapat diketahui secara jelas dan tahu apa yang diperjuangkan serta siapa pemimpin mereka, ini akan memudahkan mereka dalam memperjuangkan tujuan politiknya secara komprehensif dari luar maupun dalam negeri.

Ketika organisasi insurjensi dalam manuvernya di dalam negeri memiliki kekuatan perlawanan yang kuat akan tetapi tidak memiliki keterpaduan dengan yang baik dengan manuver politik di luar negeri seperti halnya dalam klaim siapa pemimpin mereka, maka akan memperlemah perjuangan mereka sendiri. Demikian juga sebaliknya ketika manuver diplomasi organisasi insurjensi di luar negeri menampilkan keberhasilan dalam meraih simpati internasional namun tidak memiliki hubungan dengan perlawanan dalam negeri maka tidak akan memberikan hasil yang signifikan terhadap perjuangan bersama, justru yang sering terjadi akan menimbulkan konflik internal mereka dalam menentukan visi dan siapa pemimpin mereka serta manfaat yang diperoleh oleh populasi lokal maupun untuk siapa mereka melakukan perjuangan karena tidak menutup kemungkinan munculnya penolakan keterwakilan penduduk lokal terhadap gerakan insurjensi yang berada di luar negeri dalam upaya perjuangan diplomasi untuk mendapatkan dukungan komunitas internasional.

Kekuatan diplomasi dalam meraih dukungan internasional dengan manuver bersenjata organisasi insurjensi memiliki korelasi yang kuat. Perlawanan bersenjata di dalam negeri yang lemah, akan tertutupi oleh keberhasilan

perjuangan diplomasi organisasi insurjensi, seperti yang terjadi di Timor Timur. Sedangkan dalam kasus GAM, perlawanan bersenjata ditambah dengan kekuatan berdiplomasi kelompok GAM yang berada di luar negeri memberikan posisi tawar GAM terhadap pemerintah Indonesia. Hal yang perlu diwaspadai adalah ketika kekuatan organisasi insurjensi ini menguat dan memiliki hubungan yang harmonis serta visi yang dibangun memiliki kesamaan antara di luar dan di dalam negeri karena akan menimbulkan kekuatan perlawanan yang besar terhadap negara. Dengan kata lain bahwa kekuatan yang sinergis antara front perlawanan bersenjata di dalam negeri dan front diplomasi insurjensi di luar negeri akan menjadi suatu kekuatan yang besar yang mampu mengalahkan negara sebagai pihak yang dipandang lebih kuat. Dengan melihat contoh kasus di atas ada beberapa hal yang dapat diambil sebagai pelajaran bagi pemerintah Indonesia dalam mengambil kebijakan dan strategi untuk menghadapi organisasi insurjensi sebagai bentuk kewaspadaan, di antaranya adalah (1) memaksimalkan konsep dan kemampuan COIN dengan melihat secara menyeluruh terhadap organisasi insurjensi yang dihadapi; (2) pemerintah harus mewaspadaai munculnya bentuk perlawanan secara lunak dengan mengedepankan perwakilan diplomatik di luar negeri dengan memelihara hubungan baik dengan komunitas internasional; (3) mengembangkan dan memaksimalkan peran intelijen sehingga fokus terhadap ancaman nyata terhadap eksistensi negara dalam hal ini termasuk ancaman insurjensi; (4) meminimalisir kerawanan dengan mengoptimalkan keintegrasian dan sinergitas antar aparat keamanan, pemerintah, dan lembaga masyarakat lainnya dalam menghadapi ancaman insurjensi; dan (5) memaksimalkan peran media massa, baik cetak maupun elektronik dalam dan luar negeri sebagai upaya melawan insurjensi dan pemberitaan yang berimbang.

DAFTAR PUSTAKA

- Agus, Fadilah. 2006. *Pemberontakan dan Kontra Insurgensi*. Jakarta: FRR Law Office.
- Djumala, Darmansjah. 2013. *Soft Power untuk Aceh Resolusi Konflik dan Politik Desentralisasi*. Jakarta: Gramedia.
- Galula, David. 2006. *Counterinsurgency Warfare Theory and Practice*. Westport: Praeger Security International.
- Karnavian, Mohammad Tito. 2013. Strategi Penanganan Insurgensi dan Terorisme di Indonesia.[online] terdapat di: <<http://journalsrigunting.com/2013/02/11/strategi-penanganan-insurgensi-dan-terorisme-indonesia-oleh-muhammad-tito-karnavian>> [diakses pada 27 Agustus 2013]
- Kilcullen, David J. 2010. *Counterinsurgency*. NY: Oxford University Press.
- McCormick, Gordon dalam Freeman, Michael and Hy Rothstein. 2011. *Gangs and Guerrillas*. USA: Guardian News & Media.
- Moore, R. Scott. *The Basics of Counterinsurgency* [pdf] terdapat di: <<http://smallwarsjournal.com/documents/moorecoinpaper.pdf>> [diakses pada Agustus 2013].
- Muradi. 2012. *Densus 88 AT Konflik, Teror, dan Politik*. Bandung: Dian Cipta.
- Norotouw, John Al. 2012. *Save Our Papua*. Jakarta: Cergas Media.
- Nye Jr, Joseph S. 2004. *Soft Power the Means to Success in World Politics*. New York: Public Affairs.
- O'Neill, Bard E.. 2005. *From Revolution to Apocalypse Insurgency and Terrorism*. Washington: Potomac Books Inc.
- Prabowo, J.S. 2012. *TNI dalam Menyikapi Perubahan Lingkungan Strategis*. Jakarta: PPSN.
- Scott, Andrew M. 1970. *Insurgency*. Chapel Hill: The University of North Carolina Press.
- Sukarjaputra, Yoki Rakaryan. 2010. *Auman Terakhir Macan Tamil*. Jakarta: Kompas Media Nusantara.
- Toft, Ivan Arreguin. 2005. *How the Weak Win Wars*. NY: Cambridge.
- US DoD. 2009. *Joint Publication 3-24 Counterinsurgency Operation*. USA: US DoD.
- US Department of Army. 2006. *Field Manual 3-24 MCWP 3-33.5 Counterinsurgency*. USA: Headquarters Department of Army.
- Wibisono, B Kunto. 2013. Al-Jazeera: Kantor Taliban di Doha dibuka Selasa.[online] terdapat di <<http://www.antaraneews.com/berita/380621/al-jazeera-kantor-taliban-di-doha-dibuka-selasa>> [diakses pada Agustus 2013].